

# DEMOKRASI EKONOMI

## ANTARA

### KEBERANIAN DAN BAYANGAN KEGAGALAN

Oleh: Damianus J. Hali

#### Abstract

*Economic democracy concept is really special for Indonesia. It is not too many states to apply that terminology in their economic activities. Of course, that Moh. Hatta's opinion has a reason. Nevertheless in fact today, economic democracy (Demokrasi Pancasila) has to fight in powerful of current in middle globalization and pressure international economic regim. If we have seen basic of economic democracy concept which is "Religious Socialism" that is very crumbly and not customary. Because of that, to go by this article I will to ask question and doubtful about Indonesia economic concept. I think, Hatta's economic concept has experience hard examination today and be shadow by total failure.*

**Key words:** economic democracy, Indonesia, globalization, international regim, capitalims, and socialism

#### I. Latar Belakang

Nilai-nilai demokrasi, seperti kebebasan individu (*individual freedom*), persamaan (*equality*), persaudaraan dan martabat manusia (*human dignity and brotherhood*), pemerintahan yang dibatasi (*limited goverment*), aturan hukum (*the rule of law*), dan proses politik yang demokratis (*democratic political process*)<sup>1</sup>, sebetulnya bukan hal baru manakala kita berniat membedah dogtrin demokrasi. Aristoteles yang diakui sebagai peletak dasar dogtrin demokrasi modern,<sup>2</sup> juga telah membicarakan hal yang sama. Di abad 18 dan 19, dogtrin demokrasi dengan segala macam nilainya dipakai sebagai formulasi teori yang kemudian diterapkan dalam sistem kerja pemerintahan, khususnya di bidang politik. Tokoh-tokoh kunci sebagai inspirator saat itu diantaranya, James Harrington, John Lock, Jean Jacques Rousseau, Thomas Jefferson, Thomas Paine, Jeremy Benthman, James Mill, John Stuart Mill, dan Alexis de Tocquelle<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Jack C. Plano, Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, Third Edition, Santa Barbara, California Oxford, England, 1982, hlm. 61

<sup>2</sup> Jack C. Plano, Roy Olton, loc cit.

<sup>3</sup> Jack C. Plano, Roy Olton, op. cit., hlm. 62

Sistem demokrasi di bidang politik (dulu sampai hari ini) dinilai sangat ideal, bahkan Francis Fukuyama dalam bukunya yang berjudul: *The End of History and The Last Men* (1992) menyebutnya sebagai ideologi terakhir dari segala macam ideologi<sup>4</sup>. Optimisme itu rasanya cukup beralasan karena demokrasi mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan seperti juga merupakan kecenderungan umum manusia modern. Manusia modern tidak ingin hanya dijadikan sebagai kelinci percobaan dari setiap kebijakan, seperti terjadi dalam pemerintahan teokrasi dan otoritarianisme, tetapi ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat dinilai sangat penting mengingat posisinya sebagai mesin penggerak jalannya proses pemerintahan dunia modern dalam sebuah negara.

Oleh karena keberhasilan itu, demokrasi kemudian di abad 20 diadopsi dan dipakai dalam aktivitas perekonomian sehingga muncul istilah "demokrasi ekonomi". Di banyak negara, terutama negara-negara sedang berkembang, seperti Amerika Latin, Afrika, Argentina, Uruguay, Brazil, Turki, Siprus, Mozambik, Zambia, Turki, negara-negara Asia Tenggara dan Timur jarang menggunakan istilah itu sehingga kurang dikenal. Namun semangat untuk melibatkan masyarakat banyak dalam aktivitas perekonomian cukup besar dan hampir merata di semua negara tersebut, terutama setelah Perang Dunia II (PD II) berakhir<sup>5</sup>.

Jika di banyak negara berkembang istilah demokrasi ekonomi kurang dikenal, di Indonesia justru sangat dikenal, sehingga bisa dikatakan sangat khas Indonesia. Kekhasan itu bisa dilihat dari penggunaan istilah "Ekonomi Pancasila" atau ekonomi yang berdasarkan Pancasila<sup>6</sup>, oleh Mohammad Hatta. Penggunaan istilah yang khas itu menarik untuk dikaji lebih lanjut karena dalam implementasi sampai hari ini di Indonesia justru menimbulkan kebingungan. Tambahan pula bahwa nampaknya ada kesenjangan yang cukup signifikan antara apa yang dirumuskan dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Secara sepintas masyarakat Indonesia sepertinya cenderung ke liberal-kapitalis yang berwatak semu dan praktik perekonomiannya cenderung kapitalis, bahkan sangat kapitalis<sup>7</sup>. Kenyataan semacam itu tentu sangat membingungkan, terutama Moh. Hatta (jika masih hidup)<sup>8</sup>.

Tulisan ini mencoba menelaah demokrasi ekonomi ala Indonesia yang berada diantara derasnya arus globalisasi dan kungkungan regim ekonomi Internasional. Di tengah mengemukakan tuntutan demokrasi ekonomi, yang

<sup>4</sup> Francis Fukuyama mengatakan, *The End of History and The Last Men*, dalam buku itu dikatakan: Democracy the end point of mankind's ideological evolution, Democracy the final form of human government, Democracy the end of history, New York, Free Press, 1992

<sup>5</sup> Robert A. Dahl, *A Preface to Economic Democracy*, The Regents of the university California, 1985, hlm. 67 - 74

<sup>6</sup> Sri-Edi Swasono, *Orientasi Ekonomi Pancasila*, dalam buku, *Wawasan Ekonomi Pancasila*, Universitas Indonesia (UI - Press), 1988, hlm. 1

<sup>7</sup> Revrisond Baswir, *Dilema Kapitalisme Perkoncoan*, Institute of Development and Economic analysis, 1999, hlm. 4-5

<sup>8</sup> Sri-Edi Swasono, op. cit., hlm. 2- 21

saat ini sedang trend melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah, Indonesia terpaksa harus menahan diri, mengingat kendala-kendala domestik yang belum teratasi. Selanjutnya untuk mengkonstruksi pemahaman, saya memunculkan pertanyaan-pertanyaan berikut, apakah Indonesia tidak terlalu berani berbicara mengenai demokrasi di bidang ekonomi sementara demokrasi di bidang politik saja masih penuh persoalan? Apakah orientasi demokrasi ekonomi Pancasila yang didasari nilai religius cukup efektif dalam implementasinya? Mengapa terjadi kontradiksi antara gagasan (demokrasi ekonomi Pancasila) dengan praktik perekonomian yang terjadi di tengah masyarakat? Di atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak beraturan itu, saya memilih judul: **Demokrasi Ekonomi, antara Keberanian dan Bayangan Kegagalan**

## II. Demokrasi Ekonomi dan Globalisasi

Seperti telah disinggung di atas bahwa situasi setelah PD II seakan-akan memaksa, kususnya negara-negara sedang berkembang untuk mulai memikirkan perekonomian negaranya. Hal itu disebabkan karena di masa penjajahan, aktivitas perekonomian praktis hanya dikendalikan segelintir orang, yakni penjajah dan para kaki-tangan penjajah. Kondisi itu seakan-akan sebagai legitimasi bagi masyarakat untuk berjuang mengejar ketertinggalan dengan ikut berpartisipasi aktif dalam aktivitas perekonomian. Nilai-nilai demokrasi yang awalnya ditrapkan di bidang politik Barat, seperti dijelaskan di atas kemudian dipakai dalam aktivitas perekonomian. Langkah pertama adalah mencoba pemerintahan sipil (*civil government*), seperti Negara-Negara di Amerika Latin, Afrika, Negara-Negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia<sup>9</sup> dan masih banyak negara lainnya. Hal itu dilakukan karena pemerintahan yang dipimpin militer dinilai hanya akan membangkitkan kenangan akan penjajah yang syarat dengan kekerasan dan penindasan.

Namun aktivitas perekonomian yang mendapat spirit dari nilai demokrasi belum sempat direalisasi, negara-negara itu terlanjur terjebak dalam pertikaian perebutan kekuasaan. Energi untuk membangun perekonomian setelah situasi kacau akibat PD II justru dihabiskan untuk mempertahankan kedudukan dari setiap usaha kudeta dari berbagai kelompok dalam negara, baik militer maupun sipil. Hal itu menjadi pemandangan sehari-hari di negara-negara, seperti Argentina, antara tahun 1946 – 1974, dimana Juan Domingo Peron yang terpilih menjadi presiden tahun 1946 ( lewat kudeta militer ) selalu diancam kudeta ( militer ) sampai akhir masa jabatannya<sup>10</sup>. Selain itu Brazil, antara tahun 1950 – 1976 dimana pergantian presidennya selalu diwarnai

<sup>9</sup> Samuel Hatington, *Third Wave of Democratization*, disampaikan juga dalam kuliah: Ekonomi Politik Pembangunan dari Bob S. Hadiwinata, Ph.D

<sup>10</sup> Direktorat Pelayanan Penerangan Luar Negeri, Departemen Penerangan RI, *Bangsa Dan Negara-Negara di Dunia*, Jakarta, 1997, hlm. 18- 21

kudeta berdarah<sup>11</sup>, Uruguay, antara tahun 1950 - 1984 memberantas teroris Tupamaros<sup>12</sup>, Afrika Tengah, antara tahun 1960 - 1982 dimana Presiden David Dacko selalu diancam kudeta,<sup>13</sup> dan Indonesia antara tahun 1945 - 1965 menghabiskan energi untuk menumpas pemberontakan kelompok, seperti DI, TII, RMS, PKI<sup>14</sup>. Singkatnya, situasi semacam itu menjadi sangat tidak kondusif untuk membangun perekonomian.

Keinginan awal negara berkembang untuk melibatkan masyarakat dalam aktivitas perekonomian kini pupus sudah. Aktivitas perekonomian kembali jatuh ke tangan segelintir orang, yakni elit-elit lokal dan "konco-konco" pemerintah yang berkuasa atau dalam istilah Baran ( 1973 ) "*lumpenbourgeoisie*",<sup>15</sup> dan perusahaan-perusahaan asing serta negara melalui praktik inefisiensi dalam birokrasi ( bahasa santun dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia ). Orang-orang atau lembaga seperti itulah yang mempunyai modal dan menguasai faktor-faktor produksi sehingga bisa membeli kebebasan masyarakat dan terutama kebijakan pemerintah<sup>16</sup>. Namun, sekalipun kebebasan masyarakat di negara-negara berkembang bisa dibeli, tidak berarti keinginan dalam hati kecil mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian bisa dibeli juga. Mereka pasti menunggu kesempatan yang tepat untuk mengekspresikan keinginan itu.

Apa yang terjadi sesudahnya ? Negara-negara sedang berkembang belum sempat menata perekonomian sesuai dengan semangat dalam budaya negaranya, datanglah yang namanya globalisasi dengan segala macam tuntutan. Negara-negara berkembang tidak sempat berbenah diri dari keterpurukan, tiba-tiba datang badai globalisasi dan menghantam apa pun yang ada di depannya. Kondisi itu menjadi semakin sulit manakala negara sedang berkembang belum siap untuk bersaing dalam dunia global. Mereka dihadapkan pada situasi yang sangat dilematis, antara belum tuntasnya pembenahan diri ( integrasi nasional yang belum tuntas ) akibat pertikaian yang berkepanjangan dengan datang badai globalisasi yang intinya tidak mengenal istilah, belum siap. Bagi negara yang memahami dinamika itu pasti mulai mencari peluang, seperti, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Namun bagi negara yang belum siap pasti mengalami sidrom dan mengisolasi diri, seperti Kuba dan India.

Kenyataan yang lebih menyakitkan dari kondisi di atas adalah negara berpura-pura siap, seperti Indonesia. Para pengusaha berlomba-lomba

<sup>11</sup> Direktorat Pelayanan Penerangan Luar Negeri, Departemen Penerangan RI, op. cit, hlm, 47 - 49

<sup>12</sup> Direktorat Pelayanan Penerangan Luar Negeri, Departemen Penerangan RI, op. cit, hlm, 332 - 334

<sup>13</sup> Direktorat Pelayanan Penerangan Luar Negeri, Departemen Penerangan RI, op. cit., hlm. 5 - 7

<sup>14</sup> Direktorat Pelayanan Penerangan Luar Negeri, Departemen Penerangan RI, op. cit, hlm. 113 - 116

<sup>15</sup> David Harrison, *The Sociology of Modernization and Development*, University of Sussex, London and New York, hlm. 71 - 73 dan bahan kuliah dari: Sanerya H, Ph.D

<sup>16</sup> Revrisond Baswir, loc. cit

mencari kedekatan dengan pemerintah yang berkuasa guna mendapatkan perlindungan dan pemerintah yang berkuasa berusaha mencari kedekatan dengan negara *super power* guna mendapatkan sandaran pada saat diterpa badai globalisasi. Konsekuensi lanjutannya bisa ditebak, Indonesia terburu-buru membuat kesepakatan ( *agreement* ) pinjaman utang luar negeri dengan negara lain tanpa mempertimbangkan kemampuan untuk mengembalikannya. Al hasil, maaf, jika tidak mampu mengembalikan tepat waktu, maka jangan berbicara mengenai harga diri bangsa karena kebijakan-kebijakan ekonomi-politik dalam negeri akan didikte negara dan lembaga pendonor. Selain itu pengusaha Indonesia tidak ada yang mandiri – otonom – independen dan mampu bersaing secara global di pasar Internasional karena mereka memang kurang terbiasa untuk itu. Dikalangan masyarakat, umumnya bingung melihat kecenderungan ekonomi Indonesia, mau dikatakan ekonomi kapitalis, tapi malu-malu atau ekonomi Pancasila, tapi takut karena sudah terlalu jauh dari semangat itu ? Mau bersaing dalam ekonomi pasar global, tapi tidak mampu atau mau ekonomi domestik, tapi sudah terlanjur porak-poranda tatanan ekonominya.

Di tengah ketidaksiapan atau pura-pura siapnya negara berkembang, seperti Indonesia, bagi negara-negara satelit justru menjadi peluang emas untuk terus memperluas jaringan investasi kapitalnya<sup>17</sup>. Dalam konteks ini negara-negara berkembang sepertinya “ditakdirkan” untuk selalu berada pada posisi yang subordinat. Pada masa penjajahan mereka ditekan secara fisik, kini pada masa post-kolonialisme mereka ditekan secara psikologis atau kalau boleh diistilahkan “kolonialisme psikologis” melalui kapitalisme dagang ( *merchcent capitalism* )<sup>18</sup>. Hal ini nampaknya sangat manusiawi karena selalu menggunakan jargon-jargon, membantu negara-negara sedang berkembang tetapi sebetulnya sama-sama tidak manusiawinya dengan jaman penjajahan. Atau kalau boleh dianalogikan dengan ungkapan lain, “sosialisme adalah bentuk yang lebih manusiawi dari kapitalisme”<sup>19</sup>. Negara berkembang seakan-akan dikondosikan untuk menerima kata-kata yang sangat tidak populer dan menyalitkan ini, “jika negara berkembang ingin tetap eksis maka mulailah belajar dan membiasakan diri untuk menikmati apa yang bisa diperoleh sesuai kemampuan”.

<sup>17</sup> Pada saat awal, di samaping karena terjadi penumpukan modal di negara satelit, mereka pasti membutuhkan tempat baru ( negara ) untuk menginvestasi kapitalnya dan yang dicari pasti negara berkembang. Negara berkembang dipilih sebagai tempat investasi karena tenaga kerjanya murah dan bahan baku pun murah. Bahan baku dan tenaga kerja yang murah ini tentu sangat menguntungkan negara satelit sehingga yang kembali kenegara berkembang sangat sedikit. Maka dari situ terjadilah lalulintas perdagangan, yang nampak saling membutuhkan. Tetapi sebetulnya perdagangan itu tidak seimbang, negara maju untung dan negara berkembang dirugikan, kuliah, *Teori dan Isu Pembangunan*, khusus mengenai Teori Dependencia ata Underdevelopment, dari: Sanerya H, Ph.D

<sup>18</sup> Dadid Harrison, loc. Cit, dan bahan kuliah *Teori dan Isu Pembangunan*, dari: Sanerya H Ph.D

<sup>19</sup> Frans Magnis – Suseno, *Berfilsafat dari konteks*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 70 – 80

### III. Ralitas Empirik Demokrasi Ekonomi Di Indonesia

Indonesia merupakan negara berkembang pertama yang secara lantang memperkenalkan istilah demokrasi ekonomi sejak tahun 1945 lewat Moh. Hatta. Moh. Hatta melihat kenyataan saat itu, dimana aktivitas perkonomian Indonesia praktis hanya digerakan oleh segelintir orang<sup>20</sup> yang dekat dengan pusat kekuasaan atau orang yang sudah terlanjur kaya karena diberi fasilitas pada masa penjajahan. Hal itu dinilai tidak ideal karena mengabaikan partisipasi sekelompok besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu Hatta mengatakan, demokrasi sebaiknya tidak hanya diterapkan di bidang politik, tetapi juga di bidang ekonomi supaya semua masyarakat Indonesia bisa berpartisipasi di dalamnya<sup>21</sup>.

#### A. Orientasi Demokrasi Ekonomi Pancasila

Usaha rasional dan ekspresif yang ditunjukkan Hatta tentu patut dihargai. Beliau melihat secara cermat apa yang dialami dan dirasakan masyarakat pada masa awal kemerdekaan. Usaha Hatta kemudian membuahkan hasil dengan dimasukkannya spirit demokrasi ekonomi dalam tata hukum nasional, ( secara spesifik diistilahkan dengan "Ekonomi Pancasila" ) yakni dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 23, 27 ayat ( 2 ), 33, dan 34<sup>22</sup>. Dalam pasal-pasal itu dirumuskan orientasi demokrasi ekonomi yang dimaksudkan Hatta. Menarik bahwa demokrasi ekonomi yang dimaksudkan Hatta adalah ekonomi sosialis ala Indonesia. Dan ekonomi sosialis Indonesia dilandasi paham *sosialisme religius*.

Moh. Hatta berpandangan bahwa orang Indonesia sebetulnya tidak sulit memahami istilah sosialisme religius karena hampir semua orang Indonesia beragama. Nilai-nilai sosialisme religius sudah sangat akrab dengan keseharian orang Indonesia. Namun untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rasional perlu ditelusuri lebih jauh. Menurut Moh. Hatta<sup>23</sup>, sosialisme Indonesia muncul dari tiga faktor: 1). "Paksaan agama", artinya etika agamalah yang menghendaki orang Indonesia untuk hidup tolong-menolong, ada rasa persaudaraan antar sesama, rasa keadilan, saling menghargai, dan sebagainya. Nilai-nilai itu diperjuangkan dalam rangka mewujudkan keinginan untuk menciptakan "kerajaan Allah bayangan" di dunia ini. Nilai-nilai itu disokong agama-agama di Indonesia sehingga sosialisme yang tadinya asing kini mendapat legitimasi untuk masuk mempengaruhi tatanan berpikir dan berperilaku orang Indonesia. 2). Sosialisme Indonesia adalah ekspresi jiwa berontak bangsa Indonesia yang sebelumnya dijajah bangsa lain. Mereka

<sup>20</sup> Frans Magnis – Suseno, *Kuasa Dan Moral*, PT. Gramedia, Jakarta, 1995, hlm. 43-58

<sup>21</sup> Frans Magnis – Suseno, loc.cit

<sup>22</sup> Sri-Edi Swasono, loc.cit

<sup>23</sup> Mohammad Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1963, hlm. 1-19

mendapatkan perlakuan yang sangat tidak adil dari penjajah. Sehingga begitu datang sosialisme, mereka tidak peduli lagi dari mana datangnya paham sosialis itu. Yang terpenting ada nafas baru yang dihembuskan di tengah banyangan situasi tertekan dan tertindas sebelumnya. Dengan demikian paham sosialisme yang bercorak humanis itu dengan mudah diterima orang Indonesia dan mendapat tempat istimewa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: *"bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikeantasan dan prikeadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan masyarakat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur"*<sup>24</sup>. 3). Sosialisme adalah tuntutan jiwa dan getaran hati nurani terdalam yang sejak awal telah ditopang nilai agama. Maka pada saat para pemimpin sibuk mencari dasar sosialisme dalam masyarakat Indonesia, Hatta dengan cepat menemukannya. Ia mengatakan dasar-dasar sosialisme terdapat di desa-desa kecil, yang corak kolektifismenya masih sangat kuat dan cukup mengakar. Sehingga pada saat Indonesia "ditawari" marxisme yang bercorak materialisme ala Lenin dan Stalin (PKI), ditolak orang Indonesia karena tidak sesuai dengan semangat dan jiwa Indonesia.

Dari ketiga poin di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi sosialis Indonesia berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang dikonkretkan lewat etika dan ajaran moral agama. Dengan demikian kalau diurutkan, *kemanusiaan yang adil dan beradab*: tidak mengenal pemerasan dan eksploitasi, *persatuan*: kekeluargaan, kebersamaan, nasionalisme dan patriotisme ekonomi, *kerakyatan*: mengutamakan ekonomi rakyat banyak, *keadilan sosial*: ada perlakuan yang sama untuk semua, kemakmuran masyarakat yang utama, dan bukan kemakmuran segelintir orang. Inilah *Demokrasi - Ekonomi Pancasila* yang mendapat tempat sejajar dengan *Ekonomi Sosialis Indonesia*<sup>25</sup>

## B. Kendala Demokrasi Ekonomi Pancasila

Orientasi Demokrasi Ekonomi Pancasila yang dijelaskan di atas nampaknya dalam implementasi mengalami kendala kultural dan psikologis yang sangat berat. Usaha rasional dan obyektif dari tokoh seperti Moh. Hatta, Prof. Mubyarto, Robert A. Dahl, Sri Edi Swasono, Wilopo, Widjojo Nitisastro, Prof. Dr. Frans Magnis Suseno, dan masih banyak tokoh lain untuk memasukan paradigma demokrasi dalam sistem perekonomian sampai hari ini belum menampilkan hasil yang memuaskan. Keadaan yang terjadi justru kebalikan, yakni mempraktikan demokrasi liberal-kapitalistik.

Untuk memahami kondisi itu, berikut ini saya mencoba mengidentifikasi tiga kendala utama, yakni: **Pertama**, belum terpenuhinya standar minimal

<sup>24</sup> Sri-Edi Swasono, loc.cit

<sup>25</sup> Sri-Edi Swasono, op.cit, hlm. 4 - 5

penerapan demokrasi. Standar minimal yang dimaksud adalah, 1). Masih rendahnya tingkat pendidikan ( *low education* )<sup>26</sup>. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat apresiasi masyarakat terhadap paradigma demokrasi, termasuk demokrasi dalam konteks ekonomi. Demokrasi yang dipahami hanya sebatas nilai-nilai tradisional keagamaan yang bersifat *mechanical* atau sesuatu yang *given*. Jika ada sikap solidaritas, toleransi, penghargaan terhadap orang lain, itu bukan karena kehendak orang Indonesia untuk melakukan semua itu tetapi karena melaksanakan kewajiban keagamaan. Padahal nilai-nilai demokrasi tidak diterapkan dengan cara demikian, tetapi disadari pentingnya lalu diperjuangkan. Untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi tentu saja dibutuhkan "pemahaman" berkaitan dengan hidup bersama dan bagaimana relasi dengan orang lain dapat dibangun. Maka dalam hal ini implementasi demokrasi ekonomi ala Indonesia bisa sangat tidak efektif dan tak terpahami karena ada tangan ajaib / tersembunyi ( *invisible hand* ) yang terlibat di dalamnya. 2). Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat ( *low wealth* ). Jika tingkat kesejahteraan masyarakat rendah maka populasi orang miskin dengan sendirinya meningkat. Jika mereka miskin maka seluruh waktunya dihabiskan untuk mencari makan dan tidak akan peduli dengan orang lain, apalagi berkaitan dengan urusan ekonomi negara. Selain itu kemiskinan juga akan memicu meningkatnya kejahatan dan kriminalitas. Setiap pergantian pemimpin, baik nasional maupun lokal bisa dimanfaatkan untuk menciptakan keonaran-keonaran. Dengan demikian nilai penghargaan terhadap orang lain jelas hilang dan praktis tidak mendapat tempat. Agama memang melarang semua itu tetapi tuntutan kehidupan pada akhirnya bisa saja menggeser posisi agama. 3). Jumlah kelas menengah ( *middle class* ) sedikit. Padahal kelas menengah bisa menjadi agen perubahan ( *agent exchange* ) dalam negara. Mereka pada hakekatnya sangat moderat karena sebagai perantara antara rakyat jelata dan kelompok elit. Mereka pada umumnya menjadi *good supporter for democracy*. Mereka juga mempunyai kepedulian politik yang tinggi ( *high political attention* )<sup>27</sup>.

Standar di atas memang biasa dipakai dalam wacana demokrasi di bidang politik, tetapi karena Indonesia memakai istilah demokrasi dalam aktivitas perekonomian maka standar itu pun tidak bisa disepelekan, bahkan harus menjadi perhatian utama. Sehingga pada akhirnya akan dinilai, apakah demokrasi yang salah atau sistem ekonominya, atau bahkan keberanian menerapkan demokrasi di bidang ekonominya yang harus dipertanyakan. **Kedua**, beban psikologis berkaitan dengan ekonomi yang merupakan "onderdil" dari bergeraknya mesin raksasa kapitalisme<sup>28</sup>. Semua orang Indonesia mengetahui ( entah terbukti atau tidak ) bahwa kapitalisme sudah

<sup>26</sup> Dietrich Rueschemeyer, Evelyne Stephens and John Stephens, *Capitalist Development and Democracy*, Cambridge, Polity Press, 1992, bab II dan bahan kuliah Bob S. Hadiwinata, Ph.D dan juga secara khusus dibahas Seymour Martin Lipset, *Political Man*,

<sup>27</sup> Dietrich Rueschemeyer, loc. cit

<sup>28</sup> Jack C. Plano, Roy Olton, op. cit, hlm 40 – 41

terlanjur dicurigai bahkan dinilai jahat karena eskploitatif dan hegemonistik. Maka pada saat paradigma demokrasi dipakai dalam aktivitas perekonomian, saat itu juga demokrasi dicurigai sebagai wujud dari kapitalisme. Konsekuensinya jelas bahwa Indonesia tidak akan sungguh-sungguh atau setengah hati menerapkan demokrasi, terutama di bidang ekonomi. Dalam konteks ini bisa dikatakan bahwa Indonesia terlalu berani menggunakan paradigma demokrasi dalam aktivitas ekonomi. Selain itu ada bahaya bahwa penilaian negatif terhadap demokrasi di bidang ekonomi akan berimbas pada rendahnya apresiasi masyarakat terhadap demokrasi di bidang politik. *Ketiga*, ( mirip dengan yang ke dua di atas ) saya ambil dari Prakata Keynes. Ia pernah menulis di sampul bukunya, "..... *ide-ide yang dikemukakan di sini dengan segala ketekunan adalah sederhana dan gamblang. Letak kesukaran bukan pada ide-ide baru, tetapi pada kebebasan diri dari ide-ide yang telah merambat ke dalam lubuk pikiran kita dan mereka, yang mengalami pendidikan dan perkembangan seperti kita, ....*"<sup>29</sup>.

Apa yang dikatakan Keynes ini sebetulnya bukan hal baru karena manusia selalu belajar dari lingkungan sejarahnya. Jika seseorang tinggal dan bergaul dengan penjahat di masa lalunya maka peluang untuk mejadi penjahat besar dan sebaliknya, jika seseorang tinggal di lingkungan yang baik-baik maka orang itu berpeluang besar untuk menjadi orang baik. Maka jika kita membandingkan dengan orientasi dan teori Demokrasi Ekonomi Pancasila di Indonesia, ada satu kenyataan yang tidak bisa disepelekan, yakni pengalaman Bangsa Indonesia di waktu lampau. Kita semua menyadari bahwa Bangsa Indonesia jauh lebih lama hidup di bawah penjajahan daripada hidup di alam kemerdekaan. Jiwa Bangsa Indonesia lebih lama dipelihara penjajah daripada dipelihara sendiri. Dengan demikian sisa-sisa prilaku kolonialisme dan feodalisme masih sangat kuat melekat pada orang Indonesia. Sisa-sisa prilaku itu dapat menjadi salah satu kendala yang menghambat implementasi orientasi Ekonomi Pancasila di Indonesia<sup>30</sup>. Atau lebih parah lagi, konsep orientasi Ekonomi Pancasila sendiri masih di bawah bayang-bayang dan pengaruh kolonial. Sehingga letak persoalannya bukan pada orientasi atau teorinya, tetapi pengalaman yang dibayang-bayangi kolonialisme.

Jika kita berbicara mengenai orientasi sebetulnya jelas mengacu pada Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasalny, bahkan ditopang nilai yang paling tinggi, yakni agama. Dan jika kita mempersoalkan teori, nampaknya teori Hatta tidak salah karena yang namanya teori pasti netral<sup>31</sup>, kecuali berpihak pada jamanya<sup>32</sup>. Dia hanya alat untuk membedah realitas dan tidak berpihak pada

<sup>29</sup> Sri-Edi Swasono, op.cit, hlm. 7 -12

<sup>30</sup> Sri-Edi Swasono, op.cit, hlm 7

<sup>31</sup> Sri-Edi Swasono, op.cit, hlm. 4 -5

<sup>32</sup> Teori berpihak pada jamannya dalam arti sebuah teori dibangun berdasarkan fakta dan kebutuhan real yang terjadi di jamannya. Jika sebuah teori ingin dipakai dan diterapkan pada jaman yang lain jauh sesudahnya maka untuk memahami teori itu harus pertama-tama me-rever pada situasi sejarah yang melatarbelakangi munculnya teori itu. Kemudian baru melihat

kepentingan siapapun. Ia memang harus netral karena dibangun atas dasar rasionalitas dan obyektivitas. Ketiga kendala di atas nampaknya tidak mudah dicarikan jalan keluarnya, apalagi setelah Indonesia diterpa krisis ekonomi yang berkepanjangan.

#### IV. Kesimpulan

Saya mengawali kesimpulan ini dengan sebuah paradoks pemikiran dari dua orang tokoh, yakni: Kenichi Ohmae dan John Naisbitt. Di satu pihak Kenichi Ohmae mengatakan bahwa abad 21 ditandai oleh semakin tidak berartinya batas-batas negara. Peranan negara bangsa (*nation-state*) di abad ini akan cenderung merosot. Kekuasaan dan pengaruh pemimpin negara bangsa akan digantikan oleh pemimpin perusahaan multinasional. Selain itu identifikasi produk berdasarkan negara akan sulit dilakukan karena semua produk tersebar melintasi negara mana pun<sup>33</sup>. Namun di lain pihak John Naisbitt mengatakan, keseragaman model akibat globalisasi akan mendorong menguatnya kecenderungan-kecenderungan untuk tampil beda. Selain itu, derasnya arus globalisasi akan memicu munculnya pusat-pusat budaya baru sebagai tandiangannya, sekaligus sebagai reaksi terhadap kecenderungan globalisasi yang berlebihan.<sup>34</sup> Dengan demikian, semakin deras arus keseragaman mendobrak batas-batas negara maka sekuat itu pula arus baliknya, yakni penegasan identitas dan keberbedaan.

Pendapat kedua tokoh di atas sangat tepat untuk menarik benang merah dari tulisan ini. Judul tulisan ini, "Demokrasi Ekonomi", Antara Keberanian dan Bayangan Kegagalan". Penerapan demokrasi, di satu pihak (khusus Indonesia) akan dinilai sebagai tindakan yang "kelewat" berani dan sangat mengkhawatirkan mengingat standar minimal penerapan demokrasi tidak dipenuhi. Jika standar minimalnya tidak terpenuhi tapi tetap menerapkan konsep demokrasi ekonomi maka akan terjadi pemaksaan atau dengan ungkapan lain, akan terjadi "kediktatoran ekonomi". Selain itu istilah demokrasi yang umum dipakai di bidang politik, di Indonesia dipakai di bidang ekonomi dengan penegasan khususnya akan menghadapi kesulitan tersendiri. Kalau kita membandingkan antara demokrasi di bidang politik dengan demokrasi di bidang ekonomi, demokrasi di bidang politik sangat kompromistik dan longgar penerapannya. Sedangkan demokrasi di bidang ekonomi tidak bisa dinegosiasikan. Misalnya, berbicara mengenai keadilan dan pemerataan di bidang politik mungkin hanya sebatas wacana, tetapi di bidang ekonomi tidak bisa hanya sebatas wacana, harus real dan segera direalisasikan (karena langsung terkait dengan kehidupan manusia). Dalam hal ini akhirnya bisa dipahami, mengapa negara lain tidak berani menggunakan istilah demokrasi

---

relevansinya dengan situasi yang terjadi hari ini, sehingga teori itu berdaya ekspresif sesuai kebutuhan jaman.

<sup>33</sup> Revisond Baswir, op. cit, 81 - 82

<sup>34</sup> John Naisbitt, *Global Paradox*, William Morrow and Company, Inc, New York, AS, copyright 1994, hlm. 227 -269

ekonomi dalam pembangunan perekonomian di negara mereka. Mereka menilai tuntutan demokrasi ekonomi terlalu berat. Prof. Hesse asal Jerman mengungkapkan hal serupa dalam kuliah umum di program magister FISIP Unpar beberapa waktu yang lalu. Beliau menilai bahwa pemerintah Jerman tidak berani menggunakan konsep demokrasi ekonomi (*economic democrcy*) karena takut gagal dan terjebak dalam bayangan lama, materialisme komunis - Lenin dan Stalin.

Di lain pihak, demokrasi ekonomi akan dicurigai karena sejarahnya yang tidak bisa dipisahkan dari kapitalisme, bahkan menjadi satu paket dengan kapitalisme global, yang hegemonistik dan cenderung memaksa. Kecurigaan itu tentu cukup beralasan karena kapitalisme hanya bisa jalan kalau jiwanya, ekonomi masih hidup.

Berkaitan dengan keberanian dan kekhawatiran akan bayangan kegagalan seperti dimaksudkan di atas, orang Indonesia pada akhirnya harus mengakui bahwa Demokrasi Ekonomi Pancasila sebetulnya merupakan tanggapan spontan Bangsa Indonesia atau Moh. Hatta sebagai pribadi terhadap situasi setelah PD II dan situasi global yang terjadi sampai hari ini. Artinya, ekspresi spontanitas itu muncul tanpa kajian yang mendalam, dan sikap serba salah atau "kagog" ditengah kepungan regim internasional yang sering diistilahkan dengan pasar global (*global market*). Di tengah situasi seperti itu, Indonesia ingin tampil beda dengan kekhasan dan keunikannya.

Oleh karena itu, jika Indonesia ingin membangun perekonomian, bangkit dari krisis yang sedang terjadi mungkin ada baiknya mulai dengan pemetaan kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Karena pemetaan kelemahan sekaligus bisa menjadi pintu masuk untuk menumbuhkan kekuatan-kekuatan baru di bidang perekonomian. Selain itu Indonesia juga dapat membangun fondasi yang lebih rasional dari kekhasan aktivitas perekonomian sehingga tidak sebatas nilai-nilai keagamaan, tetapi sungguh-sungguh melibatkan kesadaran kognitif untuk memperjuangkan semua cita-cita, seperti tersurat dalam Pembukaan UUD' 45. Kemampuan yang saat ini dianggap sebagai kelemahan suatu saat mungkin bisa menjadi kekuatan besar sehingga tidak sekadar berani tampil beda dan takut akan bayangan kegagalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bawsir, Revrison, *Dilema Kapitalisme Perkoncoan*, Institute of Development and Economic Analysis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Dahl, A. Robert, *A Prefase to Economic Development*: The Regents of the Univesity Califonia, USA, 1985
- Direktorat Pelayanan Penerangan Luar Negeri: Departemen Penerangan RI, *Bangsa dan Negara-Negara di Dunia*, Jakarta, 1997
- Fukuyama, Francis, *The End of History and the Last Man*: New York, Fee Press, 1992
- Hatington, Samuel, *Third Wive of Democratization*, disampaikan juga waktu kuliah: Ekonomi Politik Pembangunan dari Bob S. Hadiwinata, Ph.D
- Harrison, David, *The Sociology of Modernization and Development*, University of Sussex: London and New York 1988 ( Reprinted 1991 ) dan disampaikan juga dalam kuliah: Teori dan Isu Pembangunan dari Sanerya H, Ph.D
- Hatta, Mohmmad, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*: Djambatan, Jakarta, 1963
- Naisbitt, John, *Global Paradox*: William Morrowand, Inc, New York, 1994
- Plano, C. Jack dan Olton Roy, *The International Relations Dictionary*, Third Edition: Santa Barbara Oxford, California, USA, 19982
- Rueschemeyer, Dietrich, dkk, *Capitalist Developmentand Democracy*. Cambridge, Polity Press, 1992
- Suseno, Frans Magnis, *Berfilsafat Dari Konteks*: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992
- \_\_\_\_\_, *Kuasa Dan Morah*: PT Gramedia, Jakarta, 1995
- Swasono, Sri-Edi, *Oriantasi Ekonomi Pancasila*: Universitas Indonesia ( UI-Press), Ed, Abdul Majid dan Sri-Edi Swasono, 1988